

## Perkembangan Metropolitan Mamminasata: tinjauan kesenjangan aspek sosial-ekonomi dan tata kelola wilayah

*Mamminasata metropolitan development: the overview of social-economic aspect and regional governance gap*

**M A Yanuar<sup>1</sup>, R S Dewi<sup>1</sup>, W Handayani<sup>1</sup>, dan S Yuwanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang, Indonesia

Corresponding author's email: [asyamyanmar21@students.undip.ac.id](mailto:asyamyanmar21@students.undip.ac.id)

**Abstrak.** Mamminasata merupakan wilayah metropolitan yang tumbuh sejak tahun 1980an karena perkembangan Kota Makassar dan berdampak hingga ke wilayah sekitarnya. Metropolitan ini membentuk konstelasi dan memegang peran penting dalam pengembangan kewilayahan tidak hanya lingkup Pulau Sulawesi namun bagi Kawasan Timur Indonesia. Namun demikian, kesenjangan mulai muncul terutama antara wilayah inti, yaitu Kota Makassar dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa (Sangguminasa) dan Kabupaten Takalar sebagai wilayah pinggiran metropolitan. Dengan menggunakan metode komparasi serta analisis deskriptif kuantitatif yang diperkuat secara kualitatif berdasarkan perspektif wilayah, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara wilayah inti dan pinggiran pada Metropolitan Mamminasata berdasarkan aspek sosial-ekonomi dan kapasitas tata kelola wilayah. Hasil kajian menegaskan bahwa Kota Makassar sebagai wilayah inti Mamminasata mendominasi pada struktur ekonomi, alokasi investasi, kualitas tenaga kerja, pengeluaran masyarakat, dan kapasitas tata kelola dibandingkan wilayah pinggiran dengan proporsi yang bervariasi. Hal ini membuktikan bahwa wilayah pinggiran hanya sebagai penyuplai aktivitas dan wilayah inti yang belum optimal dalam memberikan spread effect sehingga membutuhkan upaya-upaya lain untuk mengurangi kesenjangan inti-pinggiran yang masih ada.

*Kata Kunci:* Inti-Pinggiran; Mamminasata; Metropolitan; Urbanisasi

**Abstract.** Mamminasata is a metropolitan area that has developed since the 1980s as a result of Makassar City's development impacted the surrounding area. This metropolitan formed a constellation and is critical to regional development not only on Sulawesi Island but also in Eastern Indonesia. However, as the development process has progressed, there has been a significant gap between the core area of Makassar City and the suburbs of Maros Regency, Gowa Regency (Sangguminasa), and Takalar Regency. The paper aimed to examine the disparity between the core and periphery areas of Metropolitan Mamminasata based on socioeconomic aspects and governance capacity using comparative methods and quantitative descriptive analysis that is strengthened qualitatively based on a regional perspective. The findings confirm that Makassar City, as Mamminasata's core area, dominates in economic structure, investment allocation, labor quality, community expenditure, and governance capacity when compared to suburban areas of varying proportions. This result demonstrates that the periphery area was the only activity proponent and that the core area is not yet optimal in terms of providing a spread effect, necessitating additional efforts to close the core-periphery gap that still exists.

*Keywords: Core-Periphery; Mamminasata; Metropolitan; Urbanization*

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena urbanisasi berlangsung dinamis dan kompleks sehingga memperluas makna serta pemahamannya. Urbanisasi tidak lagi diartikan secara sempit sebagai perpindahan penduduk dari perdesaan menuju perkotaan [1]. Lebih dari itu, urbanisasi juga meliputi pergeseran struktur sosial-ekonomi serta transformasi karakteristik permukiman yang seluruhnya menjadi bersifat kekotaan [2–4]. Tiga hal tersebut dapat terjadi bersamaan dan lintas administrasi sehingga menjadikan perbedaan antarwilayah semakin kabur dan beberapa justru bersifat kontinum [5].

Namun demikian, urbanisasi juga berperan dalam pembentukan dikotomi wilayah antara inti dan pinggiran atau *core-periphery* [6,7]. Diferensiasi inti-pinggiran akibat urbanisasi mudah untuk diidentifikasi, antara lain berdasarkan profil atau karakteristik kewilayahan serta kapasitas tata kelola. Dari segi profil sosial-ekonomi, wilayah inti memiliki karakter perkotaan yang identik sebagai pusat dari pemanfaatan teknologi, pengambilan keputusan, pertumbuhan dan aktivitas perekonomian, serta inovasi social. Sedangkan pinggiran, identik sebagai wilayah dengan kinerja ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang relatif rendah, kondisi sosial yang belum banyak berubah, dan sebagainya [6,8,9]. Di sisi lain, kesenjangan dalam tata kelola merupakan implikasi yang terlihat dari perbedaan kapasitas fiskal serta kualitas sumber daya antara wilayah inti dan pinggiran [10].

Metropolitan merupakan salah satu objek yang relevan untuk mengidentifikasi adanya diferensiasi antara wilayah inti dan pinggiran [7]. Di Indonesia, studi terkait wilayah inti dan pinggiran banyak dilakukan, namun terbatas pada kesenjangan yang muncul pada metropolitan-metropolitan di Pulau Jawa. Kesenjangan di antaranya teridentifikasi di Metropolitan Jabodetabek antara Jakarta sebagai wilayah inti dengan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi sebagai wilayah pinggiran dalam hal pendapatan penduduk dan

produktivitas sektor ekonomi [11,12]. Kesenjangan dalam hal ketersediaan infrastruktur serta pembangunan sosial-ekonomi juga dirasakan pada Metropolitan Gerbangkertasusila antara Surabaya sebagai wilayah inti dengan wilayah pinggirannya, yaitu Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Sidoarjo-Lamongan [13,14]. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesenjangan inti-pinggiran dalam konteks kewilayahan juga muncul pada metropolitan lain di luar Pulau Jawa.

Perkembangan metropolitan khususnya di luar Pulau Jawa menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Keberadaan infrastruktur penunjang yang lebih lengkap tentu menghasilkan peran besar sebagai pusat aktivitas, pertumbuhan sektoral, dan fungsi lainnya. Cakupan pelayanan yang lebih luas juga membentuk konstelasi kuat antara metropolitan dengan wilayah lain di berbagai pulau sehingga keberadaannya vital bagi perkembangan kewilayahan. Selain itu, pembangunan lima wilayah metropolitan di luar Pulau Jawa juga masih menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia [15].

Mamminasata merupakan wilayah metropolitan yang terdiri dari satu kota dan tiga kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa (Sangguminasa) dan Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan. Metropolitan ini terbentuk secara organik sejak tahun 1980an karena pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Makassar dan ekspansi urbanisasi di sekitarnya [16]. Mamminasata yang juga kawasan strategis nasional memiliki tiga fungsi utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra pengolahan hasil produksi; pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; serta pusat orientasi pelayanan. Peran tersebut tidak hanya diartikan sebagai penggerak dalam lingkup provinsi atau Pulau Sulawesi saja, namun dalam cakupan yang lebih luas, yaitu Kawasan Timur Indonesia.

Pada Metropolitan Mamminasata, Kota Makassar secara struktural berperan sebagai wilayah inti, sedangkan tiga daerah administrasi lainnya sebagai penyangga atau pinggirannya. Wilayah inti dalam perkembangannya didominasi oleh pertumbuhan aktivitas perdagangan-jasa, industri, pelayanan umum, dan juga pemerintahan. Sementara itu, wilayah pinggirannya mulai berkembang aktivitas industri dan logistik, meskipun tetap didominasi oleh sektor agraris. Perlu ditekankan bahwa perbedaan dalam kinerja ekonomi, dinamika sosial, kapasitas lembaga, serta munculnya beberapa kecenderungan menyebabkan kesenjangan di Metropolitan Mamminasata semakin nampak dan melebar antara inti dan pinggirannya.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara wilayah inti dan pinggirannya Metropolitan Mamminasata berdasarkan aspek sosial-ekonomi dan kapasitas tata kelola. Dua hal tersebut menjadi bahasan umum dalam pendekatan *core-periphery* sebagai konsekuensi dari adanya kecenderungan berupa dominasi politik dan eksploitasi ekonomi [17]. Namun, perbedaan dalam hal karakteristik, fungsi, konstelasi serta masih sedikitnya kajian terkait perkembangan metropolitan di luar Pulau Jawa, khususnya Mamminasata juga menjadikan bahasan ini menarik untuk didiskusikan. Bahasan yang tersaji dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan membantu pemangku kebijakan dalam mengembangkan alternatif bagi pengurangan kesenjangan antara wilayah inti dan pinggirannya.

## 2. Metode

### 2.1. Variabel penelitian

Terdapat tujuh variabel yang digunakan dalam penelitian terkait perkembangan Metropolitan Mamminasata. Keseluruhan variabel dibagi dalam dua aspek yang menekankan fenomena antarwilayah, yaitu kesenjangan pada aspek sosial-ekonomi serta kapasitas tata kelola pada metropolitan yang sedang berkembang. Variabel dalam aspek sosial-ekonomi, meliputi kontribusi dan struktur ekonomi wilayah; alokasi investasi; pengeluaran masyarakat per kapita; tingkat pendidikan masyarakat; serta tingkat pengangguran. Sedangkan aspek lainnya, yaitu tata kelola wilayah meliputi dua variabel utama, yaitu realisasi pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah.

Lima variabel dalam aspek sosial-ekonomi di atas lazim dijadikan parameter untuk melihat kesenjangan pembangunan dan indikator awal dari kemampuan wilayah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakatnya [18,19]. Atribut dalam variabel tersebut juga bersifat dinamis serta terus bertransformasi bergantung pada skala kekuatan, jangka waktu, dan kecepatan proses sosial sebagai pendorong [20,21]. Hal inilah yang mendasari aspek sosial-ekonomi selalu bervariasi baik antarwilayah atau bahkan dalam satu wilayah.

Sementara itu, perbedaan kapasitas tata kelola juga dipandang sebagai implikasi dari dikotomi inti-pinggiran dalam metropolitan. Kapasitas tata kelola diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, mengembangkan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang ada baik keuangan, manusia, fisik, dan informasi [22]. Dalam konteks antarwilayah maka kapasitas tata kelola yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menghasilkan barang-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat [23].

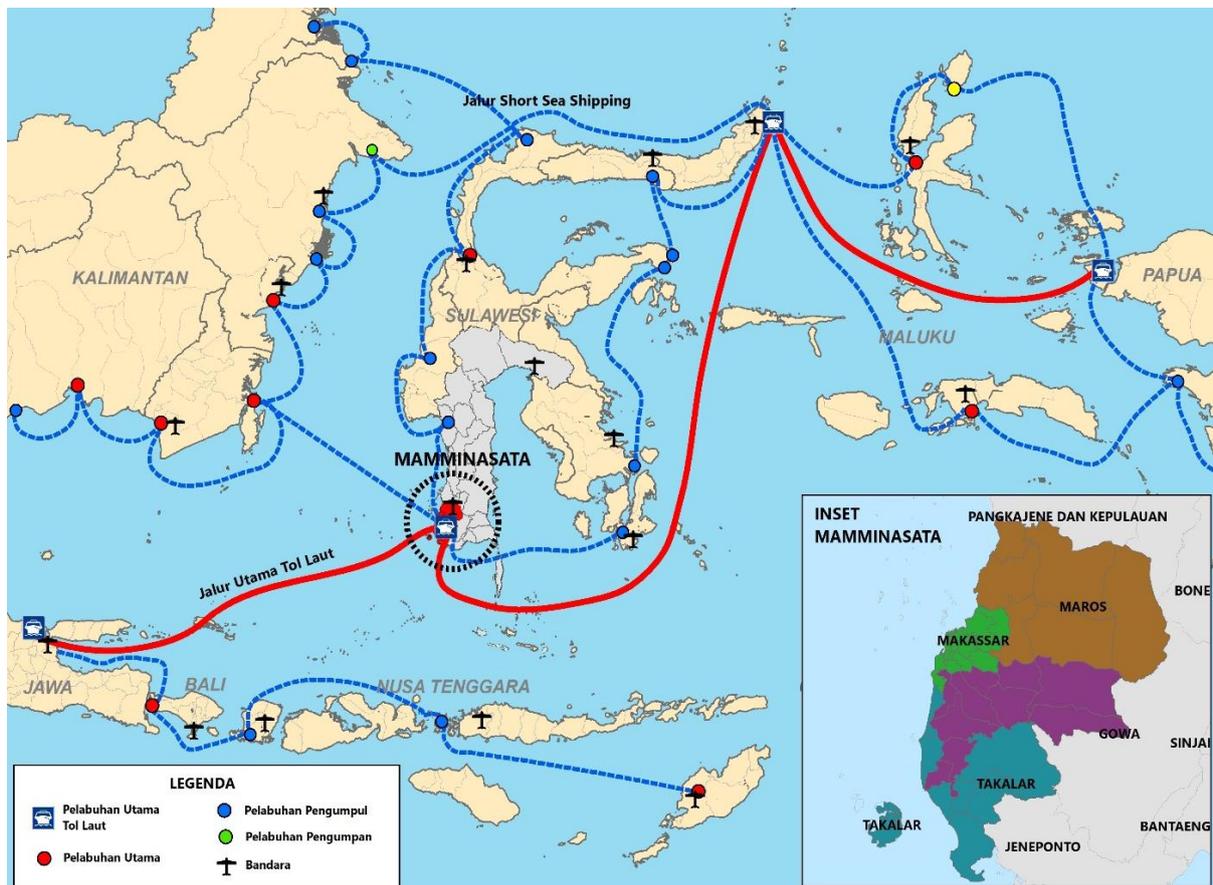
Adanya perbedaan pada dimensi sosial dan ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas tata kelola setiap daerah. Kecenderungan berupa polarisasi ekonomi, pemanfaatan sumber daya, dan marginalisasi politik semakin memperkuat adanya kesenjangan pada tata kelola daerah, khususnya dalam bentuk finansial, kapasitas pegawai, dan lainnya [10]. Oleh karena itu, realisasi pendapatan daerah serta anggaran belanja daerah dipilih sebagai variabel yang akan dikaji pada kapasitas tata kelola. Dua komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan daerah sehingga efektif dalam menggambarkan adanya perbedaan kapasitas tata kelola khususnya wilayah inti dan pinggiran dalam Metropolitan Mamminasata.

### 2.2. Lokasi penelitian

Metropolitan Mamminasata merupakan satu dari sepuluh metropolitan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Metropolitan ini ditetapkan secara tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [24,25]. Mamminasata secara administrative meliputi 48 kecamatan, yaitu 16 kecamatan di Kota Makassar, 12 kecamatan di Kabupaten Maros, 11 kecamatan di Kabupaten Gowa, dan 9 kecamatan di Kabupaten Takalar. Berdasarkan data

statistik tahun 2021, wilayah dengan luas 2.666,63 km<sup>2</sup> ini memiliki populasi sebesar 2,99 juta jiwa dimana 51,98 persen di antaranya merupakan penduduk dari Kota Makassar.

Peran Mamminasata tidak dapat dilepaskan dari keberagaman aktivitas di dalamnya. Sebagai pusat pertumbuhan dan pengolahan, keberadaan industri skala besar tentu tidak dapat dikesampingkan dengan produk berupa semen, beton, alat elektronik, bahan bakar, bahan kimia, serta produk pangan yang terkonsentrasi di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Hasil produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen skala regional maupun internasional melalui aktivitas ekspor. Sementara itu, sebagai pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan tidak terlepas dari keberadaan warisan budaya juga sejarah peradaban Makassar-Gowa dan sekitarnya serta keberadaan kawasan vital pertahanan dan keamanan negara. Terakhir sebagai pusat orientasi pelayanan ditunjang oleh status Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan segala kelengkapan pelayanan serta infrastruktur penunjangnya.



**Gambar 1.** Konstelasi Metropolitan Mamminasata di Kawasan Timur Indonesia.

Selain itu, Metropolitan Mamminasata juga membentuk konstelasi yang lebih luas bagi perkembangan Kawasan Timur Indonesia melalui perannya sebagai *hub*. Peran ini ditunjang dengan keberadaan simpul transportasi baik bandara internasional di Kabupaten Maros maupun pelabuhan di Kota Makassar yang terhubung dengan kawasan industri untuk proses

distribusi barang. Salah satu contohnya, yaitu tol laut dimana pelayaran untuk distribusi barang dari Jawa (Surabaya) menuju Sulawesi (Manado) dan Ternate (Maluku Utara) hingga Papua (Sorong) harus melewati atau transit di Metropolitan Mamminasata melalui Pelabuhan Makassar seperti Gambar 1. Infrastruktur tersebut merupakan instrumen utama yang mendukung berlangsungnya aktivitas transit penumpang maupun bongkar-muat barang dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur maupun sebaliknya. Kapasitas dari setiap infrastruktur juga ditingkatkan untuk menguatkan peran *hub* dan konstelasi yang telah terbentuk.

### 2.3. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa publikasi statistik tahunan serta dokumen atau laporan pembangunan daerah dari instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM), dan lainnya. Data yang diambil merupakan data terpisah berdasarkan empat daerah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar sehingga lebih detail dan memudahkan dalam tahap analisis. Secara spesifik, data dasar yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), populasi penduduk dan ketenagakerjaan, komponen dalam indeks pembangunan manusia, konsumsi masyarakat, serta alokasi investasi. Adapun data numerik yang digunakan pada aspek ekonomi merupakan nilai rata-rata dari data wilayah *time-series* tahun 2015-2020, sedangkan untuk aspek sosial dan kapasitas tata kelola menggunakan data tahun 2020. Keseluruhan data tersebut diakses dan dikumpulkan secara *online* dari *website* instansi yang tersedia. Selain itu, juga dilakukan tinjauan pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan, khususnya studi terdahulu terkait perkembangan metropolitan, pendekatan *core-periphery*, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

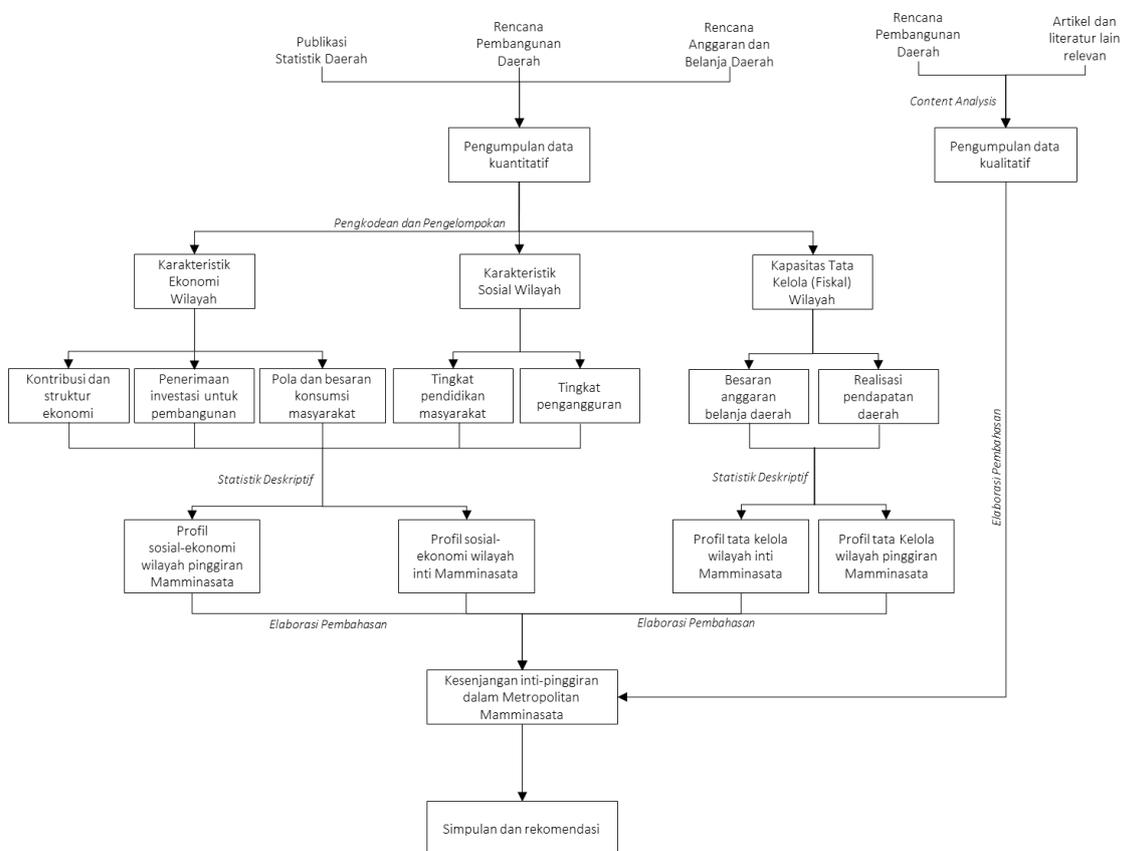
### 2.3. Tahapan analisis

Metode utama yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif berupa penggambaran fenomena berdasarkan data tahun tunggal atau secara *time series* yang diolah sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum [26]. Agar kesenjangan lebih mudah teridentifikasi, maka setiap variabel dikaji dalam bentuk komparasi atau perbandingan berdasarkan perspektif wilayah antara atribut sosial-ekonomi maupun tata kelola yang dimiliki Kota Makassar sebagai *metropolitan core* serta Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar sebagai *metropolitan periphery*. Adapun *framework* yang memuat tahapan serta analisis yang digunakan dalam kajian ini dijelaskan pada Gambar 2.

Setelah data kuantitatif pada empat daerah berhasil dikumpulkan maka dilakukan pengelompokan serta perhitungan secara agregat untuk menggambarkan profil sosial-ekonomi dan tata kelola. Selanjutnya, digunakan statistik deskriptif dengan mencari rata-rata, nilai tertinggi-terendah serta nilai perkapita melalui pembagian dengan jumlah penduduk. Nilai atau capaian kuantitatif setiap daerah juga dibagi dengan hasil agregat untuk melihat persentase kontribusinya dalam lingkup wilayah metropolitan. Selain itu,

digunakan juga perhitungan indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan, khususnya pada variabel alokasi atau penerimaan investasi antardaerah. Semua data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel sehingga didapatkan informasi utuh serta terlihat secara detail untuk proporsi setiap daerah dalam satu wilayah metropolitan.

Pendapat atau penjelasan ahli dari artikel atau sumber lain yang relevan juga disarikan menggunakan analisis isi atau *content analysis* sebagai bagian dari pendekatan kualitatif. Hasil analisis tersebut dielaborasi pada bagian pembahasan untuk memperkuat kajian fenomena kesenjangan ini. Pada akhirnya, diharapkan diferensiasi dari wilayah inti-pinggiran akan tergambar secara detail sehingga lebih mudah untuk menghasilkan preskripsi bagi wilayah Metropolitan Mamminasata pada bagian akhir.



**Gambar 2.** Framework tahapan kajian kesenjangan wilayah inti-pinggiran Mamminasata.

### 3. Hasil penelitian dan pembahasan

#### 3.1. Kesenjangan sosial-ekonomi wilayah inti dan pinggiran Mamminasata

**3.1.1. Kontribusi dan struktur ekonomi.** Berdasarkan akumulasi PDRB empat daerah, rata-rata PDRB Mamminasata tahun 2015-2020 mencapai Rp 138 triliun per tahunnya. Sebesar 77,71 persen dari jumlah tersebut merupakan kontribusi dari aktivitas penambahan nilai atas barang dan jasa pada berbagai unit produksi di wilayah inti. Sementara itu, kontribusi

wilayah pinggiran hanya mencapai 22,29 persen dengan rata-rata 7,45 persen di tiap daerahnya pada kurun waktu yang sama. Jumlah tersebut terpaut jauh, ditunjukkan oleh rata-rata daerah pinggiran yang hanya mampu menghasilkan Rp 10 triliun dari aktivitas dan transaksi ekonomi, dibandingkan Kota Makassar sebesar Rp 107 triliun.

**Tabel 1.** Karakteristik ekonomi wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2015-2020.

Karakteristik Ekonomi	Mamminasata	Wilayah Inti		Wilayah Pinggiran		Rerata daerah
		Kontribusi	Persentase	Kontribusi	Persentase	
Share PDRB (miliar/tahun)	138.230	107.425	77,71	30.805	22,29	10.268
Struktur Ekonomi						
• Primer (miliar/ tahun)	11.780	535	4,54	11.245	95,46	3.748
• Sekunder (miliar/ tahun)	26.061	21.475	82,40	4.586	17,60	1.528
• Tersier (miliar/ tahun)	72.372	56.954	78,70	15.418	21,30	5.139
Investasi (miliar/tahun)	61.986	53.961	87,05	8.025	12,95	2.674
Pengeluaran Masyarakat per Kapita (ribu/orang/tahun)	11.446	16.418	-	9.788	-	-

**Tabel 2.** Detail struktur ekonomi setiap daerah di Mamminasata tahun 2015-2020.

Kategori Sektor Ekonomi	Wilayah Inti				Wilayah Pinggiran			
	Makassar		Gowa		Maros		Takalar	
	Nilai dalam PDRB	Persentase	Nilai dalam PDRB	Persentase	Nilai dalam PDRB	Persentase	Nilai dalam PDRB	Persentase
Primer (miliar/tahun)	535	0,68	3.989	44,82	4.354	25,33	2.901	56,18
Sekunder (miliar/tahun)	21.475	27,20	789	8,87	3.464	20,15	332	6,43
Tersier (miliar/tahun)	56.954	72,13	4.120	46,29	9.367	54,50	1.930	37,37
<b>Total dalam PDRB</b>	<b>78.964</b>	<b>100,00</b>	<b>8.898</b>	<b>100</b>	<b>17.186</b>	<b>100</b>	<b>5.164</b>	<b>100</b>

Ditinjau dari strukturnya, wilayah inti berdasarkan Tabel 1 didominasi oleh sektor ekonomi tersier (perdagangan dan penyediaan jasa) serta sektor ekonomi sekunder (aktivitas industri pengolahan) dengan masing-masing kontribusi sebesar 82,40 persen dan 78,70 persen pada sektor yang sama di lingkup Mamminasata. Di sisi lain, wilayah pinggiran masih didominasi oleh sektor ekonomi primer (agraris) dengan kontribusinya terhadap Mamminasata mencapai 95 persen. Satu-satunya daerah yang masih bergantung pada sektor agraris adalah Kabupaten Takalar, yaitu sebesar 56,18 persen seperti pada Tabel 2. Sektor agraris di Kabupaten Gowa juga masih tinggi sebesar 44 persen. Sedangkan Kabupaten Maros berkembang dengan aktivitas ekonomi tersier, khususnya transportasi dan pergudangan karena keberadaan Bandara Internasional Sultan Hassanudin [27].

Terdapat keterkaitan antara perbedaan output atau *share* yang signifikan dengan struktur atau basis ekonomi antara wilayah inti dan pinggiran. Aktivitas ekonomi berupa industri dan

penyediaan jasa relatif memiliki kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan aktivitas ekonomi agraris, namun lebih tinggi dalam skala ekonomi [28,29]. Alasan lain adalah perbedaan jangkauan pasar dimana produk industri wilayah inti didistribusikan hingga ke pelosok Kawasan Timur Indonesia serta pelayanan jasanya mencakup satu provinsi. Hal tersebut menjadikan aktivitas ekonomi wilayah inti cepat tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,1 persen per tahun dibandingkan wilayah pinggiran sebesar 3,6 persen per tahun. Dukungan pemanfaatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur juga mempengaruhi perkembangan aktivitas.

*3.1.2. Alokasi investasi.* Investasi di Mamminasata pada tahun 2015-2020 rata-rata mencapai 61 triliun rupiah per tahunnya. Besarnya investasi yang masuk dipengaruhi oleh daya tarik geografis sebagai wilayah pesisir serta peran penting yang dimiliki sebagai ibukota provinsi dan metropolitan. Aktivitas ekonomi yang terus berkembang juga menjadikan investasi tidak terbatas pada pembangunan sarana-prasana, namun juga melingkupi sektor pariwisata, industri, ritel-perdagangan, dan lain sebagainya [30]. Dari jumlah tersebut, sebesar 87,05 persen atau 53 triliun rupiah per tahun masuk untuk mendukung pembangunan wilayah inti atau Kota Makassar seperti pada Tabel 1. Sementara itu, investasi yang masuk untuk wilayah pinggiran hanya 21 persen per tahun atau sebesar 2 triliun rupiah tiap daerah.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam indeks Williamson yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait distribusi investasi antardaerah di Mamminasata. Apabila dihitung dengan mengikutsertakan Kota Makassar sebagai wilayah inti, maka indeksnya sebesar 1,21. Namun, apabila dihitung tanpa Kota Makassar, maka indeksnya turun signifikan menjadi 0,27 yang menandakan distribusi nilai investasi lebih merata. Dari hasil tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa daerah pinggiran Mamminasata belum mampu membangun daya tarik investasi yang kuat meskipun objek dan sektornya yang juga beragam serta potensial. Dominasi investasi cenderung terpusat karena Kota Makassar masih menjanjikan baik dari segi permintaan *output* yang dihasilkan oleh investasi baru, pengaruh suku bunga dan pajak, serta harapan dan perkiraan iklim ekonomi di masa mendatang [31,32].

*3.1.3. Pengeluaran masyarakat per kapita.* Kesenjangan lain pada karakteristik ekonomi antara wilayah inti dan pinggiran adalah pengeluaran masyarakat per kapita. Berdasarkan statistik daerah, rata-rata pengeluaran masyarakat di Mamminasata pada tahun 2015-2020 adalah Rp 11.466.000 per tahun dan naik setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan 2,1 persen. Apabila diperinci, pengeluaran masyarakat Kota Makassar sebagai wilayah inti mencapai Rp 16.418.000 berbeda dengan masyarakat Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros sebagai wilayah pinggiran yang hanya mencapai Rp 9.788.000 per tahunnya.

Hal di atas muncul karena pola konsumsi masyarakat yang beragam sehingga menghasilkan jumlah pengeluaran yang berbeda. Pada wilayah inti, rata-rata jumlah pengeluaran masyarakat untuk non-makanan sebesar Rp 667.712 per bulan atau lebih tinggi Rp 211.671 dari jumlah pengeluaran masyarakat per bulan untuk makanan. Untuk wilayah pinggiran, rata-rata pengeluaran non-makanannya sebesar 507.672 per bulan atau hanya Rp 80.727 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran masyarakat per bulan untuk makanan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan jumlah pengeluaran salah

satunya dipengaruhi oleh konsumsi non-makanan masyarakat wilayah inti yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pinggiran. Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta kelompok aneka komoditas dan jasa menjadi pengeluaran non-makanan tertinggi masing-masing sebesar 33,49 persen dan 12,59 persen.

**3.1.4 Tingkat pendidikan masyarakat.** Tingkat pendidikan merupakan karakteristik sosial yang teridentifikasi kesenjangan di Mamminasata. Dua hal yang signifikan perbedaannya adalah rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan pada masing-masing angkatan kerja. Untuk lama sekolah, rata-rata masyarakat Mamminasata hanya selama 8,49 tahun atau setara kelas VIII SMP. Kesenjangan justru muncul saat dilakukan identifikasi lebih rinci pada masing-masing wilayah inti dan pinggiran. Rata-rata lama sekolah wilayah inti mencapai 11,21 tahun atau setara kelas XI SMA, sedangkan di wilayah pinggiran hanya mencapai 7,58 tahun atau setara kelas VII SMP. Namun demikian, rata-rata lama sekolah baik masyarakat wilayah inti dan pinggiran di Mamminasata sama-sama belum memenuhi standar lama pendidikan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 12 tahun.

**Tabel 3.** Karakteristik sosial wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2020.

Karakteristik Sosial	Mamminasata	Wilayah Inti	Wilayah Pinggiran
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,49	11,21	7,58
Pendidikan Angkatan Kerja			
• Tidak/Belum Pernah Sekolah (jiwa)			
• Tidak Lulus SD (jiwa)	391.341	103.489 (26%)	287.852 (73%)
• Pendidikan Dasar (jiwa)			
• SMP/MTs (jiwa)	175.995	75.737 (43%)	100.258 (56%)
• SMA/SMK (jiwa)	447.862	235.240 (52%)	212.622 (47%)
• Universitas/Akademi (jiwa)	273.966	170.859 (62%)	103.137 (37%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,2	15,92	5,63

Pada Tabel 3, dominasi tingkat pendidikan angkatan kerja di Mamminasata adalah pekerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 447.862 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, kontribusi antara wilayah inti dan pinggiran adalah 52 persen dan 47 persen sehingga relatif tidak berbeda jauh. Perbedaan signifikan terjadi pada tenaga kerja berpendidikan SD dan Tidak Sekolah, yaitu sebesar 391.341 jiwa, dengan 73 persen di antaranya berasal dari 3 daerah di wilayah pinggiran. Di sisi lain, pekerja di Mamminasata dengan tingkat pendidikan sarjana atau diploma sebanyak 273.966 jiwa, 62 persennya berasal dari wilayah inti.

Perbedaan komposisi menggambarkan bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan rendah didominasi oleh wilayah pinggiran, sedangkan pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi ketersediaannya terpusat di wilayah inti atau Kota Makassar. Terdapat fenomena yang ikut mempengaruhi terbentuknya kesenjangan tersebut, yaitu *brain drain* disaat masyarakat memilih bermigrasi ke perkotaan untuk menempuh pendidikan hingga mencari pekerjaan lebih layak [33]. Masyarakat wilayah pinggiran Mamminasata termotivasi untuk bermigrasi ke wilayah inti [34]. Keberadaan instansi perguruan tinggi dan jenis lapangan kerja yang lebih sesuai dan beragam menjadi daya tarik tersendiri sehingga wilayah pinggiran banyak ditinggalkan sumber daya manusianya dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

*3.1.5 Tingkat pengangguran.* Karakteristik sosial terakhir yang diidentifikasi adalah tingkat pengangguran di wilayah inti dan pinggiran. Karakteristik sosial ini secara tidak langsung menggambarkan upaya daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat serta menjadi penting karena pertumbuhan dan jumlah penduduk tinggi yang dimiliki wilayah metropolitan. Seperti pada Tabel 3, tingkat pengangguran terbuka di Mamminasata mencapai 8,2 persen pada tahun 2020. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 6,31 persen pada tahun yang sama.

Tingginya tingkat pengangguran tersebut justru lebih banyak dikontribusi oleh wilayah inti dibandingkan pinggiran. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah inti pada tahun 2020 mencapai 15,92 persen, sedangkan di wilayah pinggiran jauh lebih rendah dengan rata-rata 5,63 persen. Banyak masyarakat di wilayah pinggiran terserap pada lapangan kerja padat karya, seperti proyek konstruksi, agroindustri, maupun industri lain dengan kebutuhan tenaga kerja tinggi dan penggunaan berteknologi sederhana-menengah. Masih berkembangnya sektor agraris juga mempengaruhi masyarakat untuk bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, dan lainnya sehingga menekan tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, di wilayah inti, orientasi ekonomi sudah mengarah ke penyediaan jasa, manufaktur, dan industri padat modal yang sulit untuk ditingkatkan lagi luasan unit usaha serta terbatas juga spesifik dalam kebutuhan tenaga kerja. Pada akhirnya, laju pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja proporsional pada sektor ekonomi yang berkembang.

### *3.2. Kapasitas tata kelola wilayah inti dan pinggiran Mamminasata*

Tinjauan pertama terkait tata kelola adalah rata-rata pendapatan dari empat daerah di Mamminasata pada kurun waktu 2015-2020. Seperti pada Tabel 4, kesenjangan yang paling mencolok terdapat pada jumlah pendapatan, khususnya PAD yang terealisasi antara wilayah inti dan wilayah pinggiran. Kota Makassar sebagai wilayah inti metropolitan memiliki rata-rata PAD mencapai Rp 1,3 triliun per tahun, delapan kali lipat dari rata-rata PAD yang mampu direalisasikan oleh tiga daerah lain sebagai wilayah pinggiran, yaitu Rp 172 miliar. Untuk wilayah pinggiran, rata-rata PAD masing-masing daerah relatif berimbang dimana Kabupaten Gowa sebesar Rp 189 miliar, Kabupaten Maros sebesar Rp 215 miliar, dan Kabupaten Takalar sebesar Rp 112 miliar. Kesenjangan tersebut muncul karena wilayah inti lebih berhasil dalam mengembangkan serta merealisasikan potensi tiap mata pajak dan retribusi melalui inovasi atau strategi optimalisasi fiskal dibandingkan wilayah pinggiran [35].

Perbedaan juga terlihat apabila agregat pendapatan daerah didetailkan berdasarkan sub-subnya. Pada wilayah inti, proporsi PAD dan dana perimbangan yang notabene merupakan dana transfer dari pemerintah pusat rata-rata sebesar 36,39 persen dengan 53,90 persen. Jumlah tersebut relatif lebih berimbang dibandingkan wilayah pinggiran dimana rata-rata persentase kontribusi PAD sebesar 12,42 persen dan dana perimbangan 72,32 persen pada pendapatan daerahnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal wilayah pinggiran lebih rendah mengingat masih bergantung dari dana transfer pusat sehingga kemandirian belum terbentuk dibandingkan wilayah inti [32].

**Tabel 4.** Karakteristik sosial wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2020.

	Wilayah Inti		Kabupaten Gowa		Wilayah Pinggiran		Kabupaten Takalar	
	Kota Makassar		Kabupaten Gowa		Kabupaten Maros		Kabupaten Takalar	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
<b>A. Pendapatan Daerah</b>								
Pendapatan Asli Daerah (miliar)	1.335	36,39	189	11,35	215	15,81	112	10,11
Dana Perimbangan (miliar)	1.979	53,90	1.187	71,13	952	69,85	843	75,98
Lain-lain Pendapatan yang sah (miliar)	356	9,71	292	17,52	195	14,35	154	13,91
<b>Total</b>	<b>3.671</b>	<b>100</b>	<b>1.669</b>	<b>100</b>	<b>1.364</b>	<b>100</b>	<b>1.109</b>	<b>100</b>
<b>B. Belanja Daerah</b>								
Belanja Tidak Langsung (miliar)	1.386	35,82	967	55,08	720	52,01	633	59,56
Belanja Langsung (miliar)	2.442	63,11	739	42,12	640	46,27	414	38,97
Pembiayaan Daerah (miliar)	41	1,07	49	2,80	23	1,72	15	1,46
<b>Total</b>	<b>3.870</b>	<b>100</b>	<b>1.756</b>	<b>100</b>	<b>1.384</b>	<b>100</b>	<b>1.063</b>	<b>100</b>

Tinjauan lain terkait tata kelola adalah rata-rata alokasi belanja dari empat daerah di Mamminasata pada kurun waktu yang sama. Sama seperti pendapatan daerah, wilayah inti yaitu Kota Makassar memiliki rata-rata alokasi belanja daerah terbesar, yaitu Rp 3,8 triliun per tahun, hampir tiga kali lipat dari rata-rata belanja yang direalisasikan oleh tiga daerah lain sebagai wilayah pinggiran, yaitu Rp 1,4 triliun. Untuk wilayah pinggiran, rata-rata belanja daerah juga berimbang dimana Kabupaten Gowa sebesar Rp 1,75 triliun, Kabupaten Maros sebesar Rp 1,3 triliun, dan Kabupaten Takalar sebesar Rp 1 triliun. Kesenjangan ini juga memiliki keterkaitan dimana semakin tinggi pendapatan daerah yang dapat direalisasikan, maka semakin besar juga belanja daerah yang dapat dianggarkan.

Proporsi belanja yang besar dari wilayah inti menggambarkan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Secara detail, hal ini terlihat saat membandingkan proporsi antara belanja pegawai (belanja tidak langsung) sebesar Rp 1,4 triliun dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal (belanja langsung) sebesar Rp 2,4 triliun. Semakin besar jumlah belanja langsung juga dapat diartikan bahwa fokus daerah dalam pemenuhan standar pelayanan sudah tidak lagi mengejar tercapainya nilai minimal, namun sudah menuju tahap peningkatan kualitas dan penyediaan secara merata dan maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat [36,37].

Sedangkan pada wilayah pinggiran proporsinya menjadi terbalik dimana alokasi untuk belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Rata-rata belanja tidak langsung dari tiga daerah adalah Rp 773 miliar per tahun, sedangkan belanja langsungnya hanya sebesar Rp 598 per tahun. Proporsi belanja terbesar masih terletak pada pos belanja pegawai karena jumlah pegawai daerah dan juga gaji yang meningkat dimana tidak hanya dialami di wilayah pinggiran Mamminasata, namun juga daerah lainnya [38]. Hal tersebut menyebabkan belanja barang dan jasa serta belanja modal lebih sedikit, sehingga pemerintah daerah relatif lebih terbatas untuk melaksanakan pembangunan daerah dan umumnya hanya berfokus pada pemenuhan SPM sebagai *bussiness as usual* [36,37]. Pada akhirnya kapasitas tata kelola wilayah inti lebih unggul dibanding wilayah pinggiran karena potensi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan daerah yang sejahtera lebih besar apabila dilihat dari komponen alokasi belanja daerah.

#### 4. Kesimpulan

Mamminasata sebagai wilayah metropolitan berhasil membentuk konstelasi yang kuat dalam setiap aktivitas kewilayahan. Tiga fungsi utama yang dijalankan Mamminasata, antara lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra pengolahan hasil produksi; pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; serta pusat orientasi pelayanan. Peran tersebut tentu berpengaruh besar bagi pengembangan tidak hanya mencakup secara khusus di Pulau Sulawesi, namun Kawasan Timur Indonesia.

Sejak awal perkembangan di tahun 1980an hingga saat ini, metropolitan Mamminasata masih menyisakan permasalahan terkait kesenjangan pembangunan antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran (*core-periphery*). Dominasi Kota Makassar sebagai *metropolitan core* terlihat dari *share* serta struktur ekonomi yang terbentuk, alokasi investasi yang memusat, ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi, serta pengeluaran masyarakat dimana keempatnya relatif lebih besar dari segi jumlah maupun proporsi dibandingkan rata-rata wilayah pinggiran maupun wilayah secara keseluruhan. Pun pada tata kelola dimana Kota Makassar jauh lebih unggul kapasitasnya dilihat dari pendapatan setiap tahun dibandingkan capaian tiga daerah lain di wilayah pinggiran. Perbedaan proporsi pada belanja daerah secara tidak langsung juga menunjukkan adanya perbedaan dalam fokus pembangunan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran.

Dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan yang ada dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, institusi pendidikan, serta pihak lainnya. Kombinasi antara intervensi kebijakan disertai kekuatan pasar merupakan upaya yang dapat diterapkan dalam mengurangi sentralitas pembangunan di wilayah inti serta menyebarkannya ke wilayah-wilayah pinggiran Metropolitan Mamminasata. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan fenomena kesenjangan yang lebih kompleks dan semakin merugikan bagi wilayah pinggiran.

Berdasarkan pembahasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa di Metropolitan Mamminasata memiliki kasus yang sama dengan metropolitan lainnya di negara berkembang. Secara keilmuan, hal tersebut semakin memperkuat bahwa hubungan inti-pinggiran cenderung senjang dengan dominasi yang tinggi pada wilayah inti. *Spread effect* yang dihasilkan dari perkembangan wilayah inti relatif belum mampu secara optimal

berkontribusi pada pembangunan wilayah pinggiran, sehingga wilayah pinggiran hanya sebatas penyuplai terhadap aktivitas wilayah inti seperti pada beberapa metropolitan yang diperkuat pada kasus Mamminasata.

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada data-data sekunder dan variabel sosial-ekonomi serta tata kelola yang masih umum. Ke depannya dapat dilakukan pengkajian yang lebih spesifik tidak hanya terbatas pada aspek sosial-ekonomi dan tata kelola yang menggambarkan hubungan inti-pinggiran di Metropolitan Mamminasata. Perkembangan wilayah yang pesat disertai kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan penguatan infrastruktur sepuluh metropolitan baru termasuk Mamminasata juga menghasilkan dinamika yang mungkin mengubah kondisi wilayah. Hal tersebut menjadikan tema tentang hubungan wilayah inti-pinggiran tetap menarik untuk diteliti di masa mendatang dan juga sebagai upaya untuk penyempurnaan kajian ini.

### Referensi

- [1] Knox PL. Urbanization. *Int. Encycl. Hum. Geogr.*, 2009, p. 112–8.
- [2] McGranahan G. Urbanization. *Int. Encycl. Soc. Behav. Sci.* 2nd ed., Oxford: Elsevier; 2015, p. 958–964. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.72120-9>.
- [3] UNDESA. *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. New York: United Nations; 2019.
- [4] UNDESA. *In situ urbanization key to leaving no one behind*. *Dep Econ Soc Aff* 2021;1–7.
- [5] Zhu Y, Qi X, Shao H, He K. The Evolution of in situ urbanization and quasi-urban populations and their planning and enviromental implications in China: Case studies from Quanzhou Municipality. *Urban Popul. Dev. Environ. Dyn. Dev. Ctries.*, Fuzhou: Committee for International Cooperation in National Research in Demography (CICRED); 2007, p. 1–23.
- [6] Ramírez B. Core–Periphery Models. *Int. Encycl. Hum. Geogr.*, 2020, p. 397–402. <https://doi.org/0.1016/b978-0-08-102295-5.10034-4>.
- [7] da Cruz NF, Oh DY, Choumar NB. The Netropolitan Scale. *Cities* 2020;100:1–11. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102644>.
- [8] Siedentop S, Zakrzewski P, Stroms P. A childless urban renaissance? Age-selective patterns of population change in North American and German Metropolitan areas. *Reg Stud Reg Sci* 2018;5:1–20. <https://doi.org/10.1080/21681376.2017.1412270>.
- [9] Varol C, Sat NA. The Core-Periphery Analysis as to Socioeconomic Characteristics: The Case of Ankara. *Glob. Reg. Local Perspect. Econ. Southeast. Eur.*, Bucharest: Springer; 2021, p. 75–90. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-57953-1\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-57953-1_5).
- [10] Pugh R, Dubois A. Peripheries within economic geography: Four “problems” and the road ahead of us. *J Rural Stud* 2021;87:267–75. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.007>.
- [11] Ansar Z, Hudalah D. Deconcentration of Small-Scale Industry In Greater Jakarta Metropolitan. *Resilient Megacities Idea, Reality, Mov.*, Bogor: Crespent Press; 2013, p. 63–83.
- [12] Rukmana D, Ramadhani D. Income Inequality and Socioeconomic Segregation in Jakarta. *Urban Socio-Economic Segreg. Income Inequal.*, The Netherlands: Springer;

- 2021, p. 135–52. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_7).
- [13] Siswanto VK, Routray JK, Dewi R. Rural Urban Disparity in and around Surabaya Region, Indonesia. *J Technol Sci* 2014;25:41–53. <https://doi.org/10.12962/j20882033.v25i2.468>.
- [14] Wilonoyudho S, Rijanta R, Keban YT, Setiawan B. Urbanization and regional imbalances in Indonesia. *Indones J Geogr* 2017;49:125–32. <https://doi.org/10.22146/ijg.13039>.
- [15] PPDPP. Pengembangan Kota-kota di Luar Pulau Jawa Tingkatkan Pemerataan Pembangunan 2019.
- [16] Sulmiah S, Sakawati H, Widyawati W, Rukmana NS. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan. *J Ilmu Adm Media Pengemb Ilmu Dan Prakt Adm* 2019;16:258–72. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519>.
- [17] Kühn M. Peripheralization: Theoretical Concepts Explaining Socio-Spatial Inequalities. *Eur Plan Stud* 2015;23:367–378. <https://doi.org/10.1080/09654313.2013.862518>.
- [18] Purba B, Masbar R, Maipita I, Jamal A. Regional Disparity in Economic Development: The Case of Agropolitan Cities in North Sumatera, Indonesia. 1st Aceh Glob. Conf., Atlantis Press; 2018, p. 335–40. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.53>.
- [19] Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2012.
- [20] Burns TR, Devillé P. Socio-economics: The approach of social systems theory in a forty year perspective. *Econ Sociol* 2017;10:11–20. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-2/1>.
- [21] Hellmich SN. What is socioeconomics? An overview of theories, methods, and themes in the field. *Forum Soc Econ* 2017;46:3–25. <https://doi.org/10.1080/07360932.2014.999696>.
- [22] van Popering-Verkerk J, Molenveld A, Duijn M, van Leeuwen C, van Buuren A. A Framework for Governance Capacity: A Broad Perspective on Steering Efforts in Society. *Adm Soc* 2022;54:1767–94. <https://doi.org/10.1177/00953997211069932>.
- [23] Triastuti MRH. Governance Capacity of Local Government in Empowering Small and Medium Enterprises in Indonesia. *J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit* 2021;2:402–31. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i2.37>.
- [24] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008.
- [25] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 2020.
- [26] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2013.
- [27] Mariana M, Ridha MR. Ekspansi Bisnis Pergudangan Dusun Patte’ne Desa Temmapadduae Kabupaten Maros, 1995–2017. *J Patingalloang* 2020;7:84–92. <https://doi.org/10.26858/patingalloang.v7i1.12537>.
- [28] Herrmann RT. Large-Scale Agricultural Investments and Smallholder Welfare: A Comparison of Wage Labor and Outgrower Channels in Tanzania. *World Dev* 2017;90:294–310. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.007>.
- [29] Refqi M, Hidayat AK. *Determinants of Regional Disparities in Indonesia : Lessons from Provincial Level*. Bandung: 2019.

- [30] BKPM. Unlocking Investment Potentials. vol. 2. 2020.
- [31] Isma MA, Syechalad MN, Syahnur S. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *J Magister Ilmu Ekon* 2014;2:28–36.
- [32] Mar’afiah A. Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *J Econ* 2016;4:86–98. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i2.258>.
- [33] Yunitasari D, Khotimah K, Fathorrazi M. The Implication of Brain Gain on Brain Drain Phenomenon in Overcoming the Problem of Educated Unemployment in Indonesia. *Sosiohumaniora* 2021;23:133–40. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.26749>.
- [34] Santoso AD, Sinaga BM, Hartoyo S, Hutagaol MP. Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Migrasi Internal di Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora* 2018;20:177–87.
- [35] Azis AWR, Semmaila B, Lamo M. Analisis Pajak Daerah Kota Makassar. *J Manag Sci* 2020;1:120–36. <https://doi.org/10.52103/jms.v1i1.207>.
- [36] Safitri MID, Ananda CF, Prasetyia F. Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indones Treas Rev J Perbendaharaan, Keuang Negara Dan Kebijak Publik* 2021;6:85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>.
- [37] Zakariya A. Analisis Pengaruh Belanja daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2016.
- [38] KPPOD. Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen APBD, Daerah Lebih Produktif. [WwwkppodOrg/](http://www.kppod.org/) 2021. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1026>. (accessed January 8, 2022).